

Kewirausahaan & Bisnis

1. Penyusunan Modul "Pemberdayaan UKM Sentra Melalui Koperasi Berbasis Produk Khas Budaya Lokal
2. Pengembangan Pusat Kewirausahaan Dan Produktivitas Nasional (P2KPN) Di Universitas Sebelas Maret Melalui Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
3. Manual Layanan Pengembangan Bisnis UMKM Sektor Non Agribis
4. Strategi Adaptasi Masyarakat Pengrajin Kecil Gerabah Tradisional Dalam Mempertahankan Kemiskinannya Di Desa Bayat Kabupaten Klaten
5. Bengkel Wirausaha Sebagai Wadah Peningkatan Jiwa Kewirausahaan bagi Wirausaha Penyandang Tuna Daksa
6. Persepsi Mahasiswa UNS Terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri



**Pusat Pengembangan Kewirausahaan
LPPM Universitas Sebelas Maret
Surakarta**



PENYUSUNAN MANUAL LAYANAN PENGEMBANGAN BISNIS UKMK

SEKTOR NON AGRIBIS

Oleh :

Susantiningrum, S.Pd., SE., M.AB

Tutik Susilowati, S.Sos., M.Si

Drs. Edy Legowo, M.Pd

Ir. Joko Sutrisno, MP

Ir. Martina Andriani, MS

ABSTRAK

Usaha kecil merupakan salah satu penunjang perekonomian Negara, banyak nya pengusaha kecil yang turut memperkuat perekonomian Negara merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memajukan mereka agar mampu bersaing dan mampu bertahan di tengah arus perdagangan bebas Negara-negara Asia. Untuk memperkuat permodalan pengusaha kecil, pemerintah telah mencanangkan berbagai skim kredit dan mewajibkan perbankan untuk turut membiayai pengusaha kecil. Kemampuan permodalan sendiri bagi UKMK sektor non agribis relatif masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kesadaran dan kemampuan ekonomi UKMK sektor non agribis yang masih rendah. Sejalan dengan hal tersebut Menteri BUMN mengeluarkan SK No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tujuan Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kata Kunci : Pengusaha kecil, UKMK, Agribis

PENDAHULUAN

Permodalan usaha adalah salah satu masalah utama yang dihadapi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK). Selain itu masalah pemasaran dan manajemen pengelolaan usaha serta budaya berwirausaha adalah masalah yang tak kalah pentingnya. Hasil penelitian Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Sebelas Maret (2005) menyatakan UKMK memiliki permasalahan pula dalam :

- a) Menangkap peluang bisnis,
- b) Melakukan pemasaran yang efektif,
- c) melakukan akses permodalan usaha yang murah,
- d) Kurangnya kualitas produk dan desain produk,
- e) Kurangnya kerjasama jaringan antar pengusaha hulu dan hilir.

Dampak dari kelemahan tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada

kinerja dan kontinuitas usaha yang bersangkutan. Padahal secara nasional, UKMK merupakan penyangga utama perekonomian nasional yang mampu bertahan dalam badai perekonomian Indonesia. Di satu sisi merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, sementara di pihak lain keterbatasan-keterbatasan UKMK sangatlah riskan dalam kontinuitas usahanya. Negara-negara lain telah berhasil dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah sehingga mampu membantu perekonomian nasional negaranya. Di Indonesia menurut data BPS tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 42,4 juta unit usaha kecil dimana jumlah ini merupakan 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dominasi unit usaha ini berimplikasi pada besarnya peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja yang proporsinya sekitar 99,5% dari total pekerja di Indonesia. Peran UKM yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja diatas, tidak sejalan dengan perannya dalam pembentukan modal nasional. Sumbangannya terhadap pembentukan GDB sekitar 54,2%

pada tahun 2003 dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 2 – 4% (Dipo Alam, 2005). Dengan demikian harus dikaji ulang kebijakan pemerintah dalam pemberian layanan pengembangan bisnis UKMK.

Kemampuan permodalan sendiri bagi UKMK sektor non agribis relatif masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kesadaran dan kemampuan ekonomi UKMK sektor non agribis yang masih rendah. Di lain pihak, akses UKMK pada sumber-sumber permodalan/pembiayaan juga masih sangat terbatas, akibat belum berkembangnya usaha dari pengusaha kecil yang memiliki kelayakan ekonomi dan rendahnya kredibilitas pengusaha kecil di hadapan para debitur. Oleh sebab itu pemerintah harus membantu para pengusaha kecil dalam menciptakan berbagai macam kebijakan dan program kredit dalam rangka meningkatkan permodalan bagi para pengusaha kecil.

Untuk memperkuat permodalan pengusaha kecil, pemerintah telah mencanangkan

berbagai skim kredit dan mewajibkan perbankan untuk turut membiayai pengusaha kecil minimal sebesar 20% dari portofolio kreditnya dalam bentuk kredit usaha kecil (KUK), mengembangkan asuransi kredit (PT. Askrimdo) dan lembaga penjaminan (Perum PKK dan PT. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia), mengembangkan lembaga modal ventura di setiap propinsi dan mewajibkan setiap BUMN untuk membantu pengusaha kecil melalui penyisihan laba usahanya. Sejalan dengan hal tersebut Menteri BUMN mengeluarkan SK No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tujuan Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sementara, program bina lingkungan bertujuan memberdayakan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian Laba BUMN.

Banyak BUMN telah menjalin kemitraan dengan UKMK, dalam rangka memperkuat struktur permodalan melalui pemberian kredit lunak sebagai upaya kepedulian mereka terhadap pembinaan UKMK di Indonesia. Pemberian kredit ini dimaksudkan agar UKMK mampu mengembangkan usahanya baik dari segi permodalan, manajemen, produksi maupun pemasaran. Akan tetapi pemberian kredit tersebut belum diikuti dengan pendampingan secara intensif terhadap UKMK tersebut, sehingga setiap UKMK penerima kredit lunak mampu mengembangkan usahanya secara terarah. Studi yang telah dilakukan PPKwu LPPM UNS (2005) sebagaimana dipaparkan di bagian awal dari laporan pendahuluan ini, menunjukkan bahwa betapa masih rapuhnya pengetahuan, sikap dan wawasan manajemen bisnis UKMK. Menyadari hal tersebut maka agar UKMK mampu mengelola dan mengembangkan usahanya, maka kepada mereka perlu diberikan layanan pengembangan bisnis yang memadai. Untuk keperluan tersebut, maka perlu disusun manual layanan

pengembangan bisnis UKMK sebagai pedoman dalam memberikan layanan pengembangan bisnis, khususnya UKMK non agribis.

B. Tujuan

Melakukan penyusunan manual layanan pengembangan bisnis UKMK Non Agribis sebagai pedoman lembaga layanan pengembangan bisnis dalam memberikan layanan pengembangan

bisnis UKMK khususnya UKMK Non Agribis.

C. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya manual layanan pengembangan bisnis UKMK non agribis sebagai pedoman lembaga layanan pengembangan bisnis dalam memberikan layanan pengembangan bisnis UKMK khususnya UKMK Non Agribis.